

ABSTRAK

PERAN KEPOLISIAN DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN PADA BUKIT DI BANDAR LAMPUNG

**Oleh:
SUDRAJAT SAMPURNAJAYA**

Peran Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin yang sering terjadi pada bukit di Bandar Lampung. Pertambangan ilegal di wilayah ini telah menjadi masalah serius yang merugikan lingkungan, ekonomi, dan sosial. Berdasarkan isu hukum tersebut maka permasalahan yang akan dibahas adalah peran yang dilakukan kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam melakukan pencegahan terhadap pertambangan tanpa izin pada bukit di Bandar Lampung dan faktor penghambat Kepolisian dan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam melakukan pencegahan tindak pidana pertambangan tanpa izin.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi Pustaka dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Tipidter Polda Lampung, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (KPP-HAM Lampung), dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, Analisis data secara kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diketahui bahwa Kepolisian Bandar Lampung memiliki peran penting dalam penegakan hukum terkait tindak pidana pertambangan ilegal. Dalam menangani permasalahan Pertambangan ilegal Pihak Kepolisian memiliki Subdi IV Tipidter, Pihak Kepolisian melakukan patroli rutin, penyelidikan, dan penindakan terhadap pelaku ilegal. Setelah melakukan pencegahan pada bukit Way Laga Pihak Kepolisian menutup pertambangan tersebut karena tidak mempunyai izin pertambangan di samping itu, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) KPP-HAM juga memainkan peran kunci dalam menyadarkan masyarakat tentang dampak buruk pertambangan ilegal dan

Sudrajat SampurnaJaya

menggalang dukungan serta membuat laporan ke kepolisian daerah lampung agar di tindak atas dugaan pertambangan tanpa izin tersebut. Dalam melakukan perannya Kepolisian dan KPP-HAM memiliki faktor penghambat yaitu faktor substansi hukum, faktor penegak hukum, faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana dan faktor budaya serta yang paling dominan adalah faktor masyarakat itu sendiri.

Saran dalam penelitian ini ialah bagi pihak kepolisian untuk memiliki program kerja bersama dalam membasmi kejahatan tambang ilegal di Provinsi Lampung dengan memperbanyak personal di bidang IV Tipidter agar lebih efektif dalam mencegah terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal serta bagi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk dapat meningkatkan pelayanan yang cepat dan tanggap dalam menemukan solusi karena berperan sebagai jalur penyampai yang menampung aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Peran, Kepolisian, Lembaga Swadaya Masyarakat, Pertambangan Ilegal

ABSTRACT

THE ROLE OF THE POLICE AND COMMUNITY INDUSTRIAL INSTITUTIONS IN PREVENTING MINING CRIMES WITHOUT PERMISSION ON THE HILLS IN BANDAR LAMPUNG

**By:
SUDRAJAT SAMPURNAJAYA**

The important role played by the Police and Non-Governmental Organizations (NGOs) in efforts to prevent criminal acts of mining without permits which often occur on the hills in Bandar Lampung. Illegal mining in this region has become a serious problem that is detrimental to the environment, economy and society. Based on these legal issues, the problems that will be discussed are the role played by the police and Non-Governmental Organizations (NGOs) in preventing unauthorized mining in the hills and the inhibiting factors in preventing criminal acts of mining without permits experienced by the police.

The method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach which uses primary data and secondary data. The data collection method used the literature study method and was supported by interviews with resource persons in this research consisting of the Lampung Regional Police Tipidter Investigator, Chair of the Lampung Non-Governmental Organization (KPP-HAM Lampung), and Lecturer in the Criminal Law Department, Faculty of Law, Lampung University. Data analysis was qualitative.

Based on the results of the research and discussion, it can be seen that the Bandar Lampung Police have an important role in enforcing the law regarding illegal mining crimes. The police carry out routine patrols, investigations and action against illegal perpetrators. In addition, Non-Governmental Organizations (NGOs) also play a key role in making people aware of the negative impacts of illegal mining and gathering support. for prevention by engaging in advocacy, education and environmental monitoring

Sudrajat SampurnaJaya

The suggestion in this research is for the police to have a joint work program in eradicating illegal mining crimes in Lampung Province by increasing the number of personnel in the Tipidter IV field to be more effective in preventing illegal mining crimes and for Non-Governmental Organizations (NGOs) to be able to improve services. which is fast and responsive in finding solutions because it acts as a conveyance channel that accommodates community aspirations.

Keywords: Police Role, Non-Governmental Organizations, Illegal Mining